



Implementasi Kebijakan Pengelolaan Standar Sarana Dan Prasarana di Taman Kanak-Kanak Negeri Pertiwi III Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir

Sri Harnawati¹, Nur Komariah², Nurmadiyah³

Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Indragiri, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: sriharnawati546@gmail.com, nurkomariah7179@gmail.com,
norma.diah09219@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 10 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of policies on the management of facilities and infrastructure standards at TK Negeri Pertiwi III, Bagan Jaya Village, Enok District, Indragiri Hilir Regency. The results indicate that the implementation of the facilities and infrastructure management policy has been carried out, but has not yet been fully optimal. The school has made various efforts to align the provision and management of facilities and infrastructure with established standards through gradual procurement, utilization of existing facilities, and maintenance of learning support facilities. The commitment of the principal and teachers plays an important role in sustaining policy implementation despite various limitations. The implementation of this policy is influenced by supporting and inhibiting factors. Supporting factors include good cooperation among educators, strong commitment from school management, and government support, although it has not been continuous. Meanwhile, the main inhibiting factors are limited budget, insufficient number of facilities and infrastructure to meet the standards, and a management system that has not yet been fully structured. These conditions have caused the fulfillment of facilities and infrastructure standards to not be fully implemented in accordance with existing regulations. Thus, the implementation of the policy on managing facilities and infrastructure standards at TK Negeri Pertiwi III shows a gap between normative policy and actual practice in the field. Nevertheless, the efforts made by the school reflect awareness and responsibility in supporting the improvement of the quality of early childhood education services.

Keywords: Policy Implementation, Facilities and Infrastructure Standards, Early Childhood Education (ECE).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan standar sarana dan prasarana di TK Negeri Pertiwi III Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya optimal. Sekolah telah melakukan berbagai upaya penyesuaian terhadap standar yang ditetapkan melalui pengadaan sarana secara bertahap, pemanfaatan fasilitas yang tersedia, serta pemeliharaan sarana pendukung proses pembelajaran. Komitmen kepala sekolah dan guru menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan implementasi kebijakan meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh faktor

pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi kerja sama yang baik antar pendidik, komitmen manajemen sekolah, serta adanya dukungan dari pemerintah meskipun belum bersifat berkelanjutan. Adapun faktor penghambat utama meliputi keterbatasan anggaran, jumlah sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar, serta sistem pengelolaan yang belum terstruktur secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, implementasi kebijakan pengelolaan standar sarana dan prasarana di TK Negeri Pertiwi III menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik di lapangan. Meskipun demikian, upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah mencerminkan adanya kesadaran dan tanggung jawab dalam mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan anak usia dini.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Standar Sarana Dan Prasarana, PAUD.*

PENDAHULUAN

Pendidikan anak usia dini merupakan fase fundamental dalam pembentukan karakter, kemampuan sosial, dan perkembangan kognitif anak. Pada tahap ini, lembaga pendidikan dituntut untuk menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung seluruh aspek tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, keberadaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi salah satu elemen penting yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan, termasuk Taman Kanak-Kanak (TK) (Sari, N. P., & Yuliana, R: 2021).

Secara umum, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas sarana dan prasarana memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas proses pembelajaran, kenyamanan guru dalam bekerja, serta kemampuan lembaga pendidikan memenuhi standar layanan minimal. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, kelayakan sarana seperti ruang kelas, ruang guru, area bermain, sanitasi, serta fasilitas penunjang lainnya menjadi penentu utama terciptanya proses pembelajaran yang optimal (Rahmawati, D., & Fitriani, H: 2020).

Ketersediaan dan kelayakan sarana serta prasarana pendidikan anak usia dini (Early Childhood Education – ECE) telah menjadi perhatian berbagai lembaga internasional seperti UNESCO, UNICEF, dan World Bank. Mereka menekankan bahwa kualitas pendidikan anak usia dini sangat dipengaruhi oleh lingkungan belajar yang aman, sehat, dan stimulatif, termasuk tersedianya fasilitas fisik yang sesuai dengan tahap perkembangan anak (Putri, A. S., & Lestari, R: 2019).

Idealnya, satuan pendidikan memiliki fasilitas yang lengkap dan layak guna menunjang proses belajar mengajar secara optimal. Namun, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua sekolah mampu memenuhi standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan pemerintah. Banyak lembaga pendidikan, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, masih beroperasi dengan kondisi yang jauh dari memadai. Fenomena seperti ruang kelas yang bocor, kelangkaan alat permainan edukatif (APE), tidak tersedianya ruang UKS, ketiadaan perpustakaan, serta minimnya sarana sanitasi, seringkali menjadi gambaran nyata fasilitas pendidikan di tingkat dasar, termasuk pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK). Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas pembelajaran, kenyamanan belajar peserta didik, serta efektivitas implementasi kurikulum. Masalah tersebut

menjadi isu global yang menuntut perhatian serius, mengingat sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor fundamental bagi terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan bermutu (Widodo, A., & Kurniasih, E: 2022).

Pemerintah melalui Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana PAUD, SD, SMP, dan SMA menetapkan standar minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan, mulai dari ketersediaan ruang kelas, ruang guru, fasilitas bermain, hingga kelayakan perabot, media pembelajaran, sanitasi, dan keselamatan lingkungan sekolah. Regulasi ini menekankan bahwa sarana dan prasarana bukan hanya menjadi penunjang administratif, tetapi juga merupakan faktor strategis yang sangat memengaruhi kualitas pembelajaran serta perkembangan peserta didik (Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana PAUD, SD, SMP, dan SMA).

Secara umum, implementasi standar sarana dan prasarana di satuan PAUD masih menghadapi berbagai isu. Beberapa isu umum yang sering muncul antara lain keterbatasan luas lahan, minimnya anggaran, belum optimalnya penataan ruang-ruang pembelajaran, kurangnya fasilitas bermain yang sesuai standar, dan tidak memadainya sarana sanitasi. Selain itu, sebagian lembaga PAUD mengalami kendala dalam pengelolaan sarana dan prasarana, misalnya tidak adanya prosedur inventarisasi yang tertib, kurangnya kompetensi pengelola sarpras, belum adanya rencana pemeliharaan secara berkala, serta ketidaksesuaian fasilitas dengan jumlah peserta didik. Isu-isu lainnya mencakup rendahnya pemahaman terhadap standar nasional, sehingga implementasinya tidak terintegrasi dengan baik dalam perencanaan sekolah (Arikunto, S.: 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Fitriani penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar satuan PAUD telah berupaya melaksanakan kebijakan pengelolaan standar sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan pemerintah, khususnya dalam penyediaan ruang kelas, alat permainan edukatif, serta media pembelajaran. Namun, hasil penelitian yang dimaksud juga mengungkapkan bahwa masih terdapat kendala berupa keterbatasan dana operasional dan kurangnya dukungan sarana bermain luar ruang, sehingga pemenuhan standar belum sepenuhnya optimal di seluruh lembaga PAUD yang diteliti (Rahmawati, D., & Fitriani, H: 2020).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sari dan Yuliana hasil penelitian yang dimaksud menunjukkan bahwa implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana PAUD berdasarkan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 telah berjalan cukup baik, terutama pada aspek pemanfaatan sarana prasarana dalam kegiatan pembelajaran. Guru mampu mengoptimalkan fasilitas yang tersedia untuk mendukung perkembangan anak usia dini. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa aspek pemeliharaan dan pengawasan sarana prasarana masih belum maksimal, sehingga diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah dan pengelola sekolah dalam memastikan keberlanjutan kualitas fasilitas Pendidikan (Sari, N. P., & Yuliana, R: 2021).

Hasil-hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan standar sarana dan prasarana sangat ditentukan oleh

beberapa faktor penting. Studi-studi sebelumnya memperlihatkan bahwa satuan pendidikan yang berhasil mengimplementasikan standar umumnya memiliki perencanaan sarpras yang baik, koordinasi yang efektif, dukungan anggaran, supervisi yang berkelanjutan, dan kompetensi pengelola sarpras yang memadai. Sebaliknya, penelitian lain menemukan bahwa kendala umum implementasi berkaitan dengan keterbatasan dana, minimnya fasilitas, rendahnya tingkat kepatuhan terhadap standar nasional, dan kurangnya kolaborasi antara sekolah dan pemerintah daerah. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa penataan ruang yang tidak sesuai standar dapat menghambat proses pembelajaran dan berdampak pada efektivitas kerja guru.

Keterbatasan sarana dan prasarana juga dialami oleh TK Negeri Pertiwi III Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, yang menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan standar sarana dan prasarana sebagaimana ditetapkan dalam Permendikbud. Ketidaksihesuaian antara kebutuhan fasilitas dengan kondisi nyata di sekolah mengakibatkan proses pembelajaran anak usia dini tidak dapat berjalan optimal. Dengan demikian, permasalahan keterbatasan dana dan rendahnya dukungan masyarakat menjadi global problem yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan standar sarana dan prasarana di lembaga pendidikan, termasuk pada TK Negeri Pertiwi III.

Permasalahan lain yakni kurangnya penataan ruang guru, sehingga ruang guru tidak berfungsi secara optimal sebagai pusat koordinasi, pusat perencanaan pembelajaran, ruang administrasi, dan ruang kegiatan profesional tenaga pendidik. Penataan ruang yang belum maksimal menyebabkan guru kesulitan dalam menyusun perangkat pembelajaran, membuat laporan perkembangan anak, atau melakukan kegiatan kolaboratif. Selain itu, beberapa sarana lain seperti media pembelajaran, area bermain, serta fasilitas pendukung masih memerlukan penataan agar selaras dengan ketentuan Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023, terutama terkait aspek kelayakan, keamanan, dan kebermanfaatan bagi peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi standar sarana dan prasarana belum berjalan sepenuhnya sesuai pedoman yang berlaku.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan pengelolaan standar sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, khususnya di TK Negeri Pertiwi III Desa Bagan Jaya. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggambarkan realitas empiris di lapangan secara menyeluruh tentang implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lokasi penelitian ditetapkan di TK Negeri Pertiwi III Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan subjek penelitian meliputi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait implementasi

kebijakan pengelolaan standar sarana dan prasarana. Data penelitian diperoleh melalui teknik wawancara mendalam, observasi langsung terhadap kondisi sarana dan prasarana, serta studi dokumentasi terhadap dokumen perencanaan, laporan, dan regulasi yang relevan (Anggraini, D., & Lestari, D. A: 2021). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis secara sistematis untuk menemukan pola, kesesuaian, serta kendala dalam implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik, sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi. Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan pengelolaan standar sarana dan prasarana di TK Negeri Pertiwi III Desa Bagan Jaya serta faktor-faktor yang memengaruhinya (Anisyah, N.: 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Standar Sarana dan Prasarana di TK Negeri Pertiwi III Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap Kepala TK Negeri Pertiwi III Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, diperoleh gambaran mengenai peran kepala sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan standar sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini. Observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas kepala sekolah dalam mengelola fasilitas sekolah, proses pengambilan keputusan, serta keterlibatannya dalam pengawasan sarana dan prasarana.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa Kepala TK memiliki peran aktif dalam perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Kepala TK terlihat melakukan pendataan terhadap kondisi fasilitas yang ada, seperti ruang kelas, alat permainan edukatif, dan fasilitas sanitasi. Pendataan tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun usulan pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana kepada pihak terkait, baik kepada dinas pendidikan maupun melalui dukungan komite sekolah.



Gambar 1.1 Suasana Kelas TK

Dalam implementasi kebijakan, Kepala TK tampak mengoordinasikan guru dan tenaga kependidikan untuk menjaga kebersihan serta keamanan sarana dan

prasarana sekolah. Kepala TK juga memberikan arahan kepada guru agar memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara maksimal dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, Kepala TK terlibat langsung dalam pengawasan penggunaan alat permainan edukatif agar tetap sesuai dengan fungsi dan tidak membahayakan peserta didik.

Dari aspek pengelolaan, Kepala TK berupaya menyesuaikan standar sarana dan prasarana dengan kondisi nyata sekolah. Meskipun belum seluruh fasilitas memenuhi standar ideal, Kepala TK menunjukkan inisiatif dalam melakukan perbaikan bertahap, seperti memperbaiki ruang kelas yang rusak ringan dan mengganti alat permainan yang sudah tidak layak pakai. Upaya tersebut dilakukan sesuai dengan kemampuan anggaran sekolah yang terbatas.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa Kepala TK memiliki komitmen dalam menerapkan kebijakan standar sarana dan prasarana sebagai bagian dari peningkatan mutu layanan pendidikan. Hal ini terlihat dari kepeduliannya terhadap kenyamanan dan keselamatan peserta didik, seperti memastikan ruang belajar cukup terang, ventilasi udara memadai, serta lingkungan sekolah relatif bersih dan tertata.

Secara keseluruhan, hasil observasi menunjukkan bahwa Kepala TK Negeri Pertiwi III Desa Bagan Jaya telah melaksanakan perannya dengan cukup baik dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan standar sarana dan prasarana. Kepala TK tidak hanya berfungsi sebagai pengelola administrasi, tetapi juga sebagai penggerak dalam pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas sekolah. Meskipun masih terdapat keterbatasan, upaya yang dilakukan mencerminkan adanya tanggung jawab dan kesadaran terhadap pentingnya sarana dan prasarana dalam menunjang proses pembelajaran di pendidikan anak usia dini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala TK Negeri Pertiwi III Desa Bagan Jaya, diperoleh keterangan bahwa pihak sekolah telah berupaya melaksanakan kebijakan standar sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala sekolah menyatakan bahwa:

“Sekolah kami selalu berusaha menyesuaikan sarana dan prasarana dengan standar yang ditetapkan pemerintah, meskipun belum semuanya terpenuhi secara maksimal. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.”



Gambar 1.2 Wawancara dengan kepala TK

Sementara itu, hasil wawancara dengan guru kelas menunjukkan bahwa sarana pembelajaran yang ada sudah cukup membantu proses belajar mengajar, meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan. Salah seorang guru menyampaikan bahwa:

“Alat permainan edukatif dan fasilitas belajar sudah ada, tetapi jumlahnya masih terbatas sehingga harus digunakan secara bergantian oleh anak-anak. Namun, kami tetap berupaya memanfaatkan sarana yang ada seefektif mungkin.”

Selain itu, hasil observasi dan wawancara dengan tenaga kependidikan menunjukkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana telah dilakukan melalui pencatatan inventaris dan pemeliharaan sederhana, meskipun belum sepenuhnya didukung oleh sistem manajemen sarana dan prasarana yang terstruktur secara formal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut, dapat dianalisis bahwa implementasi kebijakan pengelolaan standar sarana dan prasarana di TK Negeri Pertiwi III Desa Bagan Jaya telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Sekolah telah menunjukkan adanya komitmen untuk melaksanakan kebijakan dengan menyesuaikan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki terhadap standar nasional pendidikan anak usia dini. Hal ini terlihat dari adanya upaya pengadaan sarana pembelajaran, alat permainan edukatif, serta pemeliharaan fasilitas sekolah meskipun dilakukan secara bertahap.

Implementasi kebijakan ini juga tercermin dalam pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang proses pembelajaran. Guru berperan aktif dalam mengelola dan memanfaatkan fasilitas sekolah secara kreatif agar tujuan pembelajaran tetap tercapai. Hal ini sejalan dengan konsep implementasi kebijakan pendidikan, di mana keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan sarana, tetapi juga oleh kemampuan sumber daya manusia dalam mengelolanya (Asiyah, T., Permana, N., Syarifudin, E., & Fauzi, A.: 2023).

Namun demikian, keterbatasan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana menjadi indikasi bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang bersifat normatif dengan realitas implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana di TK Negeri Pertiwi III masih memerlukan penguatan, baik dari aspek perencanaan, pengadaan, maupun sistem pengelolaan sarana dan prasarana secara berkelanjutan.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Standar Sarana dan Prasarana di TK Negeri Pertiwi III Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir

Terdapat beberapa faktor dalam menerapkan implementasi kebijakan dengan Hasil wawancara dengan kepala sekolah menunjukkan bahwa salah satu faktor pendukung utama dalam implementasi kebijakan sarana dan prasarana adalah adanya dukungan dari pemerintah dan komitmen internal sekolah. Kepala sekolah menyatakan bahwa:

"Kami mendapat bantuan dari pemerintah meskipun belum rutin setiap tahun. Selain itu, kerja sama antar guru juga menjadi faktor penting dalam menjaga dan memanfaatkan sarana yang ada."



Gambar 1.3 Wawancara Tentang Faktor-Faktor

Guru juga mengungkapkan bahwa semangat kebersamaan dan rasa tanggung jawab menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan tersebut. Seorang guru menyampaikan bahwa:

"Kami saling bekerja sama dalam menggunakan dan merawat fasilitas sekolah agar tetap bisa digunakan dalam jangka waktu lama."

Di sisi lain, hasil wawancara juga mengungkap adanya beberapa faktor penghambat. Kepala sekolah menyatakan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama, sebagaimana diungkapkan berikut:

"Keterbatasan dana membuat pengadaan sarana dan prasarana tidak bisa dilakukan sekaligus, sehingga harus disesuaikan dengan skala prioritas."

Selain itu, faktor kondisi geografis dan keterbatasan akses terhadap fasilitas pendukung juga menjadi hambatan dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa implementasi kebijakan pengelolaan standar sarana dan prasarana di TK Negeri Pertiwi III dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung utama meliputi komitmen kepala sekolah dan guru, kerja sama internal yang baik, serta adanya bantuan pemerintah meskipun terbatas. Faktor-faktor ini berperan penting dalam menjaga keberlangsungan implementasi kebijakan meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya.

Sementara itu, faktor penghambat yang paling dominan adalah keterbatasan anggaran, yang berdampak langsung pada lambatnya pemenuhan standar sarana dan prasarana. Selain itu, keterbatasan manajemen sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya terstruktur juga menjadi kendala dalam optimalisasi penggunaan fasilitas yang ada. Faktor lingkungan dan aksesibilitas turut memengaruhi kemampuan sekolah dalam memperoleh dan memperbaiki sarana pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan lapangan, dapat dianalisis bahwa implementasi kebijakan pengelolaan standar sarana dan prasarana di TK Negeri Pertiwi III Desa Bagan Jaya dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat yang saling berkaitan satu sama lain. Faktor pendukung utama dalam implementasi kebijakan ini adalah adanya komitmen yang kuat dari kepala sekolah

dan guru dalam mendukung penyediaan serta pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan. Komitmen tersebut tercermin dari upaya sekolah dalam merencanakan kebutuhan sarana secara bertahap, menjaga dan merawat fasilitas yang tersedia, serta mengoptimalkan penggunaannya dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Selain itu, kerja sama internal antar pendidik dan tenaga kependidikan juga menjadi modal penting dalam mengatasi keterbatasan yang ada, sehingga proses pembelajaran tetap dapat berjalan dengan baik meskipun sarana dan prasarana belum sepenuhnya memenuhi standar.

Dukungan dari pemerintah, meskipun masih bersifat terbatas dan belum berkelanjutan, turut menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengelolaan standar sarana dan prasarana di TK Negeri Pertiwi III. Bantuan tersebut, baik dalam bentuk fasilitas maupun pendanaan, memberikan kontribusi nyata dalam pemenuhan kebutuhan dasar sarana pendidikan anak usia dini. Namun, karena sifatnya yang belum rutin, sekolah dituntut untuk memiliki kemampuan adaptasi dan kreativitas dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Dalam konteks ini, peran kepala sekolah sebagai manajer pendidikan menjadi sangat penting dalam menentukan skala prioritas kebutuhan sarana dan prasarana agar kebijakan tetap dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Di sisi lain, faktor penghambat yang paling dominan dalam implementasi kebijakan ini adalah keterbatasan anggaran. Keterbatasan dana berdampak langsung pada lambatnya pemenuhan standar sarana dan prasarana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam regulasi pendidikan. Kondisi ini menyebabkan pengadaan fasilitas pendidikan harus dilakukan secara bertahap dan belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan sekolah. Akibatnya, terdapat beberapa sarana dan prasarana yang jumlahnya belum mencukupi atau kondisinya belum ideal untuk mendukung proses pembelajaran secara maksimal.

Selain keterbatasan anggaran, faktor penghambat lainnya adalah manajemen sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya terstruktur dan sistematis. Pengelolaan sarana dan prasarana masih bersifat sederhana dan lebih berfokus pada pemanfaatan sehari-hari, belum sepenuhnya didukung oleh perencanaan jangka panjang, sistem inventarisasi yang komprehensif, serta evaluasi berkala terhadap kondisi fasilitas sekolah. Keterbatasan dalam aspek manajerial ini berdampak pada kurang optimalnya penggunaan dan pemeliharaan sarana yang ada, sehingga potensi kerusakan atau penurunan fungsi fasilitas pendidikan menjadi lebih besar.

Faktor lingkungan dan aksesibilitas juga turut memengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan standar sarana dan prasarana di TK Negeri Pertiwi III. Kondisi geografis dan keterbatasan akses terhadap penyedia sarana pendidikan menyebabkan proses pengadaan dan pembaruan fasilitas menjadi lebih lambat dan membutuhkan biaya yang relatif lebih besar. Hal ini semakin memperkuat tantangan yang dihadapi sekolah dalam memenuhi standar sarana dan prasarana secara optimal.

Dengan demikian, implementasi kebijakan pengelolaan standar sarana dan prasarana di TK Negeri Pertiwi III Desa Bagan Jaya merupakan hasil dari interaksi yang dinamis antara faktor pendukung dan faktor penghambat. Keberhasilan

implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh sejauh mana sekolah mampu memaksimalkan faktor pendukung yang ada dan meminimalkan dampak dari faktor penghambat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, diperlukan dukungan yang lebih berkelanjutan dari pemerintah, khususnya dalam hal pendanaan dan pembinaan manajemen sarana dan prasarana. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan juga menjadi langkah strategis agar pengelolaan sarana dan prasarana dapat dilakukan secara profesional dan berkelanjutan, sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi secara optimal dan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan anak usia dini.

Dengan demikian, implementasi kebijakan pengelolaan standar sarana dan prasarana di TK Negeri Pertiwi III Desa Bagan Jaya merupakan hasil interaksi antara faktor pendukung dan penghambat yang saling memengaruhi. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, diperlukan dukungan yang lebih berkelanjutan dari pemerintah, penguatan manajemen sarana dan prasarana sekolah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar standar yang ditetapkan dapat terpenuhi secara optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan pengelolaan standar sarana dan prasarana di TK Negeri Pertiwi III Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Sekolah telah berupaya menyesuaikan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana dengan standar yang ditetapkan melalui pengadaan secara bertahap, pemanfaatan fasilitas yang ada, serta pemeliharaan sarana pendukung pembelajaran. Komitmen kepala sekolah dan guru menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan implementasi kebijakan meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Implementasi kebijakan pengelolaan standar sarana dan prasarana di TK Negeri Pertiwi III juga dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi kerja sama yang baik antar pendidik, komitmen manajemen sekolah, serta adanya dukungan pemerintah meskipun belum berkelanjutan. Sementara itu, faktor penghambat utama adalah keterbatasan anggaran, jumlah sarana yang belum mencukupi standar, serta sistem pengelolaan sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya terstruktur. Kondisi ini menyebabkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum yang telah memfasilitasi penerbitan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

Anggraini, D., & Lestari, D. A. (2021). Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan di TK PKK Dewi Sartika Jabung Malang. *IJIGAEd: Indonesian Journal of Islamic Golden Age Education*, 3(2)

-
- Anisyah, N. (2020). Manajemen Sarana dan Prasarana dalam PAUD (Early Childhood Education). *Education Research Journal*, 5(1)
- Arikunto, S. (2019). *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Asiyah, T., Permana, N., Syarifudin, E., & Fauzi, A. (2023). Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan untuk Mendukung Proses Belajar Peserta Didik di Madrasah. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(2)
- Fadilah, F. R. (2022). Pengembangan Manajemen Sarana dan Prasarana di PAUD Plamboyan. *Jurnal Tinta Emas*, 4(1)
- Fadillah, R., & Aliyyah, R. R. (2021). Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah. *Karimah Tauhid: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2)
- Fajartriani, T., & Karsiwan, W. (2020). Manajemen Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 6(1)
- Farkhanuddin, M. (2021). Pengaruh Pengelolaan Sarana dan Prasarana terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah. *Jurnal Madako Education*, 11(1)
- Fathurrahman, F., & Putri Dewi, R. O. (2020). Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Mendukung Proses Belajar Siswa di SDN Puter 1 Kembangbahu Lamongan. *Reforma: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(2)
- Fitria, A. (2021). Analisis Manajemen Sarana Prasarana di Lembaga PAUD Anna Husada Bangkalan. *PGPAUD Trunojoyo Journal*, 5(1)
- Hasliadi, N. (2022). Analisis Manajemen Sarana dan Prasarana di Taman Kanak-Kanak (TK). *Aulad: Journal on Early Childhood*, 5(2)
- Inayah, H., & Saputra, A. (2023). The Strategic Role of Facilities and Infrastructure Management in Improving the Quality of Learning at PAUD in Rural Areas. *Journal of Elementary School Research & Development*, 7(1)
- Iskandar, Y. Z., Aulia, D., Suryadi, S., Masitoh, S., & Puspitasari, E. (2022). Tata Kelola Manajemen Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Tahsinia*, 3(2)
- Mahdalina, M. (2021). Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan dalam Proses Pembelajaran Anak Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Tabukan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(1)
- Manurung, R., Harahap, E., Tahrun, T., & Suharyadi, A. (2020). Manajemen Sarana Prasarana di Sekolah Dasar Negeri 1 Kota Prabumulih. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 12(2)
- Marie, H. (2022). Analisis Manajemen Sarana Prasarana Efektif Meningkatkan Kreativitas Anak Usia Dini. *Jurnal Tunas Siliwangi*, 8(1)
- Nabilah, M. R., Aulia, N. T., Juna, R. T., & Marini, A. (2023). Meningkatkan Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar untuk Menciptakan Pembelajaran Berkualitas. *Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 6(2)
- Nurmadiyah, N. (2019). *Manajemen Sarana dan Prasarana*. Al-Afkar: Manajemen Pendidikan Islam, 4(1)
- Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana PAUD, SD, SMP, dan SMA

-
- Putri, A. S., & Lestari, R. (2019). Evaluasi Implementasi Standar Nasional Pendidikan pada Aspek Sarana dan Prasarana TK. *Jurnal Pendidikan Anak*, 4(3)
- Rahayu, T. S. (2021). Implementasi Manajemen Sarana Prasarana dalam TK Insan Cita 1. *Jurnal Amal Pendidikan*, 3(2)
- Rahmawati, D., & Fitriani, H. (2020). Analisis implementasi standar sarana dan prasarana pada pendidikan anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(2).
- Rahmawati, D., & Fitriani, H. (2020). Analisis Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di PAUD. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1)
- Rohiyatun, B., & Najwa, L. (2020). Pengelolaan Sarana dan Prasarana di PAUD. *Jurnal Visionary*, 5(1)
- Rosida, W., & Nurzaima, N. (2022). Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah pada PAUD Nurul Maghfirah Kota Kendari. *Edum Journal*, 4(2)
- Rossydh, N. I., Mukaromah, K., Puspitasari, M. A., & Adianti, V. A. (2021). Analisis Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Kesek 1. *Jurnal Media Akademik*, 6(1)
- Santi, A. (2020). Strategies for Managing Facilities and Infrastructure in Inclusive Education. *Journal of Research & Humanities*, 9(1)
- Sari, N. P., & Yuliana, R. (2021). Implementasi standar sarana dan prasarana PAUD berdasarkan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(2)
- Siregar, K. J., Annisa, A.-M., Siregar, I. C. E., Lubis, G. D., Puandra, E. M., & Ningsih, W. (2023). Analysis of Facilities and Infrastructure Management in Improving Education Quality at SMP Negeri 35 Medan. *Algoritma: Jurnal Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 4(2)
- Slameto. (2015). *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Susanti, U. V. (2021). Manajemen Sarana dan Prasarana dalam Menunjang Proses Pembelajaran di PAUD. *Edusiana*, 5(1)
- Widodo, A., & Kurniasih, E. (2022). Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini di Daerah Terpencil. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 8(1)
- Yuliana, D. E. (2019). *Pengelolaan Sarana pada Program PAUD Percontohan Nasional di SKB Banjarnegara*. Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta